

Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP pada Kpn Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong

¹Revi Candra

¹IAIN Batu Sangkar - revicandra@iainbatusangkar.com

Abstrak— Laporan keuangan merupakan sarana mengkomunikasikan informasi keuangan dari hasil proses aktivitas akuntansi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum dianggap rumit untuk diterapkan pada badan usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Berdasarkan hal tersebut IAI mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dapat mengakomodir kebutuhan akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank Sulut Go. Kopkar Bank Sulut Go merupakan badan usaha yang mengelola dana anggotanya dalam bentuk simpan pinjam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian berdasarkan pada penyajian neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas tahun 2015 dan laporan arus kas tahun 2015, menunjukkan KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong belum menyajikan catatan atas laporan keuangan (CALK), adanya kesalahan dalam pengklasifikasian pos akun, serta adanya inkonsistensi dalam memperbarui laporan arus kas. Penelitian ini menyarankan agar koperasi mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan dalam CALK, memperbarui setiap komponen laporan keuangan, dan mempekerjakan karyawan yang terampil di bidang akuntansi.

Kata Kunci — Laporan Keuangan, SAK ETAP

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Koperasi mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Koperasi dan berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu peran Koperasi yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat Koperasi dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar, karena Koperasi dan UKM dianggap mampu beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Koperasi merupakan salah satu usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Koperasi dalam menjalankan usahanya sangat berpegang pada nilai-nilai luhur pancasila dan UUD 1945 dimana koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya bukan badannya sendiri. Koperasi tidak hanya sebagai bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun dinegeri ini, tetapi dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Koperasi memerlukan pencatatan akuntansi dalam menunjang usahanya. IAI mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk diterapkan oleh entitas-entitas tertentu dalam menyajikan laporan keuangannya. Koperasi merupakan salah satu entitas yang termasuk dalam kategori untuk menerapkan SAK-ETAP. Laporan keuangan adalah tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. IAI (2012:2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk

pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi 3, yaitu manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintah. SAK ETAP sendiri dibuat untuk mengatasi segala keluhan penerapan PSAK umum pada entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP bertujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan entitas tanpa akuntabilitas publik dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya entitas tanpa akuntabilitas publik menerapkan SAK-ETAP dalam menyajikan laporan keuangannya. KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam golongan entitas tanpa akuntabilitas publik sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dalam menyajikan laporan keuangannya perlu menerapkan SAK-ETAP.

Tujuan Penelitian

Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis penerapan SAKETAP pada penyajian Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatas Atas Laporan Keuangan dari KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.

2 TINJAUAN PUSTAKA

1) Koperasi

International Cooperative Alliance (ICA) yang dikutip oleh Hendar, (2010:18) mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antar anggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip koperasi. Ropcke (2012:14) mengartikan koperasi sebagai suatu

organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama/klien perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu koperasi merupakan prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Kusuma dan Budianto (2016) menyatakan bahwa pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya yang berakhlak mulia, termasuk kewirausahaan dan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri, koperasi mampu menjadi badan usaha utama dalam perekonomian.

2) Akuntansi

Menurut Pangerapan (2016) akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengidentifikasi, mencatat dan melaporkan informasi ekonomi yang terjadi dalam suatu kegiatan usaha, untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen. Duska *et al* (2011: 10) menyatakan bahwa akuntansi ialah suatu teknik, praktiknya merupakan seni atau kerajinan yang dikembangkan untuk membantu orang dalam memonitori transaksi ekonominya. Akuntansi memberikan gambaran keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi suatu organisasi atau orang. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyangkup proses mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi serta mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan pada pengguna laporan keuangan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3) Laporan Keuangan

Fahmi (2012: 21) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kieso (2011: 5) mendefinisikan laporan keuangan sebagai sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan tidak hanya dicatat dalam satu siklus akuntansi, tetapi juga diolah sedemikian rupa dan diringkas sehingga dapat memberikan informasi finansial yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Dari pengertian tersebut laporan keuangan dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh dari proses akuntansi yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi keputusan-keputusan mengenai perusahaan.

4) Tujuan Laporan Keuangan

Kasmir (2012: 10) menyatakan secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. IAI (2012: 2) menjelaskan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

5) Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan menurut SAK ETAP meliputi:

- Neraca;
- Laporan Laba Rugi;
- Laporan Perubahan Ekuitas yang menunjukkan: (i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- Laporan arus kas; dan
- catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

6) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Wuwungan (2016) menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk koperasi saat ini adalah SAK-ETAP. Penggunaan SAK-ETAP sendiri merupakan runtutan atas keputusan IAI dibawah Menteri Keuangan, yang menghapus PSAK No.27 tentang Akuntansi Koperasi terhitung sejak 8 April 2011. Koperasi sendiri pada hakikatnya merupakan suatu entitas, namun masih belum memiliki akuntabilitas publik, bentuk akuntabilitas koperasi masih kepada para anggotanya. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP disahkan oleh 18 orang anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2012 di Jakarta. SAK ETAP terdiri atas 30 bab dan dilengkapi dengan daftar istilah di bagian akhir. Entitas yang diizinkan untuk menggunakan SAK ETAP adalah entitas yang: (1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: (1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau (2) Entitas menguasai

aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

7) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP

SAK ETAP paragraf 2.24 menyatakan bahwa pengukuran unsur laporan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Lebih lanjut lagi SAK ETAP menjelaskan pada paragraf 2.34-2.37 mengenai pengakuan unsur laporan keuangan yang dijelaskan sebagai berikut;

a. Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan.

b. Kewajiban.

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

c. Penghasilan.

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

d. Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

8) Pengukuran Laporan Keuangan berdasarkan SAK-ETAP

SAK ETAP paragraf 2.30 menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. SAK ETAP menambahkan pada paragraf 2.31 bahwa dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar.

9) Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan SAK-ETAP

SAK ETAP paragraf 3.2 menjelaskan bahwa laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan,

kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 *Konsep dan Prinsip Pervasif*. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Lebih lanjut lagi pada paragraf 3.9 SAK ETAP menyatakan bahwa informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan. Jika laporan keuangan termasuk komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut.

3 METODOLOGI PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-komparatif dimana peneliti mengumpulkan, mengevaluasi serta membandingkan penyajian laporan keuangan KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dengan SAK ETAP yang berlaku.

2) Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini berlokasi di Jl. S. Sukowati Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Waktu penelitian yang dibutuhkan kurang lebih 1 (satu) bulan tepatnya pada bulan November 2016 yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis.

3) Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian menyangkut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut: (1) Peneliti melakukan observasi dan studi literatur untuk menemukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian serta menemukan metode yang akan digunakan dalam penelitian; (2) Melakukan permohonan izin penelitian pada objek penelitian; (3) Mengetahui struktur organisasi objek penelitian, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing; (4) Mengetahui bagian-bagian yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan; (5) Menelusuri proses penyajian laporan keuangan yang ada di objek penelitian; (6) Membandingkan hasil yang diperoleh dari kopersi dengan SAK ETAP untuk dijadikan acuan dasar dalam menganalisa permasalahan yang ada; dan (7) Menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk objek penelitian berdasarkan hasil penelitian.

4) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas: (1) Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (non-numerik). Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi; dan (2) Data kuantitatif adalah data

yang berbentuk angka atau bilangan (numeric). Data kuantitatif berupa laporan keuangan satu tahun (Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan) pada tahun 2015.

5) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yakni berupa laporan keuangan diantaranya neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas per desember tahun 2015, dan laporan arus kas per desember 2016 pada KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.

6) Teknik Pengumpulan Data

- Dokumentasi, Beberapa dokumen dan arsip yang relevan yang dapat dibuat dari catatan atau dokumen yang ada seperti profil perusahaan dan laporan posisi keuangan/neraca perusahaan. Peneliti memperoleh data berupa profil perusahaan dan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas tahun 2016, dan laporan arus kas tahun 2016; dan
- Interview/wawancara, metode ini dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Peneliti mewawancarai Pengurus dan Karyawan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi mengenai jenis usaha dan penyajian laporan keuangan KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.

7) Metode Analisis

- Deskriptif, Metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi; dan
- Komparatif, Metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori dan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan praktik yang terjadi pada KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong didirikan pada tahun 1982 dipelopori oleh pegawai-pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, yang saat itu merupakan koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam di mana dananya dihimpun dari anggota koperasi yang kemudian berkembang untuk unit usaha pertokoan. Adapun yang menjadi anggota koperasi adalah pegawai-pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.

Neraca

Neraca KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. SAK ETAP mensyaratkan pos-pos minimal yang perlu pada neraca.

Laporan Laba-Rugi

KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong mencantumkan 3 dari 5 pos-pos minimal yang harus ada dalam laporan laba rugi berdasarkan syarat yang berlaku pada SAK ETAP.

Tabel 1

Checklist Pos-pos Neraca pada KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong

No	Pos-pos pada Neraca	Ada/Tidak
1.	Kas dan Setara Kas	Ada
2.	Piutang Usaha dan Piutang Lainnya	Ada
3.	Persediaan	Ada
4.	Properti Investasi	Tidak Ada
5.	Aset Tetap	Ada
6.	Aset Tidak Berwujud	Tidak Ada
7.	Utang Usaha dan Utang Lainnya	Ada
8.	Aset dan Kewajiban Pajak	Tidak Ada
9.	Kewajiban diestimasi	Tidak Ada
10.	Kas dan Setara Kas	Ada

Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas berdasarkan SAK ETAP pada KPN Serumpun dimuat dalam tabel 2.

Tabel 2

Checklist Informasi Laporan Perubahan Ekuitas pada Kopkar Bank Sulut Go

No	Informasi Perubahan Ekuitas	Ada/Tidak
1.	Laba atau Rugi untuk periode	Ada
2.	Pendapatan atau beban yang diakui langsung dalam ekuitas	Ada
3.	Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui	Tidak ada
4.	Rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode	Ada

Tabel 3

Ilustrasi Pos Aktivitas Pendanaan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

1.	Kenaikan/Penurunan Hutang Pihak Ketiga	Rp. xxxxxx
2.	Kenaikan/Penurunan Hutang Bank	Rp. xxxxxx
3.	Kenaikan/Penurunan Kewajiban Lain	Rp. xxxxxx
4.	Kenaikan/Penurunan Simpanan Pokok	Rp. xxxxxx
5.	Kenaikan/Penurunan Simpanan Wajib	Rp. xxxxxx
6.	Kenaikan/Penurunan Cadangan Koperasi	Rp. xxxxxx
7.	(Pembagian Sisa Hasil Usaha)	Rp. xxxxxx
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp. xxxxxx

Pembahasan

Entitas harus membuat suatu pernyataan secara eksplisit dan penuh pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang

Lebong tidak memiliki CALK sehingga koperasi belum secara penuh menerapkan SAK ETAP sebagai panduan dalam menyajikan laporan keuangannya. Suatu laporan keuangan yang lengkap berdasarkan SAK ETAP harus memiliki CALK sedangkan KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong tidak menyajikan CALK dalam laporan keuangannya. CALK pada dasarnya berfungsi untuk memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Dalam penyajian neraca KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong tidak menyajikan kewajiban pajak. KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong menyajikan beban berdasarkan fungsi beban, namun fungsi beban yang dimiliki koperasi ini hanya satu fungsi beban yaitu beban operasional. Hal ini menyebabkan koperasi melakukan beberapa kesalahan dalam mengklasifikasikan beban menurut fungsinya karena tidak semua beban memiliki fungsi yang sama. SAK ETAP menyatakan bahwa beban pajak harus diklasifikasikan kedalam pos sendiri, hal ini tidak dilakukan oleh KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong. Penyajian laporan perubahan ekuitas yang dilakukan oleh kopkar pada dasarnya sudah sesuai dengan format laporan perubahan ekuitas yang dikeluarkan oleh SAK ETAP. Penyajian laporan arus kas aktivitas operasi dan investasi KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong sudah sesuai dengan SAK ETAP, namun untuk aktivitas pendanaan KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong masih melakukan beberapa kesalahan. Dalam penyajian laporan arus kas aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong terdapat beberapa akun yang seharusnya tidak disertakan dalam aktivitas pendanaan. SAK ETAP paragraf 7.2 menjelaskan bahwa cerukan bank pada umumnya termasuk dalam aktivitas pendanaan jika dimaksudkan untuk hal pendanaan, namun SAK ETAP juga menambahkan bahwa jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas yang digunakan sebagai aktivitas operasi. Kewajiban tersebut tidak bisa dimasukkan dalam arus kas aktivitas pendanaan tetapi diakui sebagai aktivitas operasi. Koperasi sendiri menyatakan bahwa pinjaman yang didapatkan dari bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan digunakan untuk aktivitas operasi, hal ini menunjukkan bahwa koperasi kurang tepat dalam mengklasifikasikan pos-pos pada aktivitas pendanaan karena seharusnya hutang bank harus dimasukkan kedalam aktivitas operasi. Sedangkan hutang pihak ketiga didefinisikan sebagai hutang usaha oleh koperasi. Hutang usaha berdasarkan SAK ETAP termasuk dalam aktivitas operasi. Selain itu laporan arus kas terakhir yang disajikan oleh KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong tercatat pada periode 2016, sehingga bisa dilihat bahwa koperasi tidak memperbarui laporan keuangannya.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis dari KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa

dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP. Adapun hal-hal yang membuat koperasi ini memiliki kekurangan dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan SAK ETAP adalah karena minimnya pengetahuan mengenai SAK ETAP itu sendiri dan kurangnya kesadaran manajemen akan pentingnya laporan keuangan.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

- Bagi Koperasi Karyawan dan Pengurus KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong: (a) Koperasi secara umum belum mengungkapkan secara penuh kebijakan akuntansi signifikan pada catatan atas laporan keuangan, maka sebaiknya dibuat catatan atas laporan keuangan yang memuat tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan sebagai acuan bagi pihak eksternal yang berkepentingan dalam memahami laporan keuangan perusahaan; (b) Koperasi sebaiknya memperbarui laporan keuangannya; dan (c) Manajemen sebaiknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya laporan keuangan.
- Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI): Sebaiknya Memberikan sosialisasi terbuka mengenai penyusunan laporan keuangan dalam kaidah SAK ETAP bagi perusahaan yang tergolong UMKM di setiap kota yang ada di Indonesia.
- Bagi Politeknik Raflesia Rejang Lebong: Sebaiknya dapat ikut melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan mengenai penerapan SAK ETAP bagi perusahaan kecil dan tenaga kerja didalamnya, sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Ariantini, Ni Luh Gede. 2014. *Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, <http://ejournal.undiksha.ac.id/> diakses 8 Februari 2015. Vol.4, No.1.
- Duska, R., Duska, B.R., Ragatz, J.A. 2011, *Accounting Ethics*, 2nd-ed, Singapore, Wiley Blackwell.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Hendar, 2010, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Erlangga, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2012, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kusuma, H. & Budianto, H. 2016, *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis SAK ETAP Terhadap Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi*, Jurnal Cahaya Aktiva Politeknik Cahaya Surya Kediri, [JIRA©2018 - 25](http://www.cahayasurya.ac.id/jurnal/content.php?module=jurnal_poltek diakses 8 Februari 2015. Vol. 3, No. 2. Hal.81-91.
Pemerintah Republik Indonesia. 2012. <i>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian</i>. Jakarta

</div>
<div data-bbox=)